NILAI BUDAYA INDIGENOS, *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*, DAN ERA INDUSTRI 4.0: PENGALAMAN PRIBADI DALAM PSIKOLOGI

Augustinus Supratiknya

Universitas Sanata Dharma
Surel: aswignyawardaya@yahoo.co.id

ABSTRACT

Sustainable development as a continuation of the discourse of development that was designed by the developed nations for the underdeveloped ones during the Cold War era, has the potential of creating a dilemma between progress-welfare versus impoverishment-underdevelopment when confronted with the real situations of the poor-underdeveloped nations with their indigenous cultural values. The forthcoming of the Industry 4.0 era which is the cultural product of the developed nations seems to even accelerate the rate of underdevelopment of those poor-developing nations. Realizing the dilemma hidden in the discourse of development, Psychology with a cultural turn orientation gives more emphasis on the discourse of freedom-liberation as the goal of individual as well as social transformations. Hence, Psychology with a cultural turn orientation is basically open to any kinds of concepts and ideas as far as they are in line with or even strengthen its orientation towards the liberation of every person or groups of person for the creation of a common welfare which is truly just for all people

Keywords*: sustainable development, inidigenous cultural values, Industry 4.0 era, cultural turn, liberation*

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan sebagai kelanjutan dari wacana pembangunan yang dirancang oleh bangsa-bangsa maju bagi bangsa-bangsa sedang berkembang dalam era Perang Dingin, tetap berpotensi menimbulkan dilema antara kemajuan-kesejahteraan versus pemiskinan-keterbelakangan jika dihadapkan dengan situasi nyata bangsa-bangsa miskin-terbelakang dengan nilai budaya indigenos mereka. Kehadiran era Industri 4.0 yang merupakan produk budaya bangsa-bangsa maju diduga justru berpotensi mempercepat laju keterbelakangan bangsa-bangsa miskin-sedang berkembang. Menyadari dilema yang tersembunyi dalam wacana pembangunan, Psikologi berorientasi hampiran budaya lebih mengutamakan wacana pembebasan-pemerdekaan sebagai tujuan transformasi individu maupun masyarakat. Untuk itu, Psikologi berorientasi hampiran budaya pada dasarnya terbuka terhadap semua konsep dan gagasan dari mana pun sepanjang sejalan atau bahkan memperkuat orientasinya ke arah pemerdekaan semua orang atau kelompok orang demi terciptanya kesejahteraan bersama yang sungguh-sungguh berkeadilan bagi semua orang.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, nilai budaya indigenos, era Industri 4.0, hampiran budaya, pemerdekaan.

1. PENDAHULUAN

Pada kesempatan ini ijinkanlah saya mengungkapkan pengalaman saya sebagai seseorang yang belajar, meneliti, dan mengajarkan Psikologi di sebuah perguruan tinggi di Indonesia mencoba mencerna konsep-konsep utama yang termuat dalam tema Seri Seminar Nasional ke-III Universitas Tarumanegara hari ini, yaitu: nilai budaya indigenos, *sustainable development*, dan (era) Industri 4.0. Untuk itu, pertama akan saya paparkan secara ringkas situasi Psikologi di Indonesia, kemudian akan saya coba tunjukkan sejenis dilema yang berpotensi dimunculkan oleh proyek *sustainable development* terhadap nilai-nilai indigenos di era Industri 4.0, dan akhirnya akan saya uraikan impian saya mengikuti *cultural turn* atau *hampiran budaya* (Sugiharto, 1996) dalam mengembangkan Psikologi khususnya namun mungkin juga berlaku bagi disiplin ilmu lainnya, dalam rangka mempromosikan kesejahteraan sejati yang berkeadilan bagi semua masyarakat di zaman sekarang. Mengingat forum ini dihadiri oleh para skolar dari berbagai disiplin ilmu termasuk Psikologi dengan keyakinan epistemik yang mungkin berbeda-beda, saya mohon maaf apabila apa yang akan saya bagikan ini dirasakan terlalu parokial bahkan personal, kurang universal.

2. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Psikologi di Indonesia

Awal sejarah Psikologi di Indonesia lazimnya dilekatkan pada pidato ilmiah Prof. Dr. Slamet Iman Santoso, guru besar Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pada upacara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-I di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (kini Institut Teknologi Bandung) pada 2 Februari 1952. Dalam pidato itu Prof. Slamet menekankan perlunya Psikologi untuk menerapkan 'prinsip seleksi' yang dipandang makin penting baik dalam pemanfaatan tenaga kerja yang telah tersedia maupun dalam penyiapan tenaga kerja untuk tugas-tugas baru. Semua itu dimaksudkan demi efisiensi berupa diperolehnya 'the right man in the right place' baik dalam dunia pekerjaan maupun pendidikan. Peristiwa ini diikuti dengan dimulainya penyelenggaraan pendidikan ahli-ahli psikologi pada 5 Maret 1953 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mula-mula berupa kursus Asisten Psikologi, berkembang menjadi jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan pada tahun 1960/1961 – tepatnya pada 1 Juli 1960 - berdiri menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (Santoso, 1975; 'Sejarah', 2021a). Peristiwa ini diikuti dengan pendirian Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran pada 2 September 1961 ('Sejarah', 2021b), Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada pada 8 Januari 1965 ('Sejarah', 2021c) serta pendirian fakultas dan/atau jurusan Psikologi di berbagai universitas lain baik negeri maupun swasta di Tanah Air. Hingga kini terdapat paling sedikit 127 lembaga penyelenggara pendidikan tinggi psikologi berupa fakultas atau jurusan dalam universitas, institut maupun sekolah tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Mereka berhimpun dalam Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia atau AP2TPI (Anggota, 2021) dan hingga kini telah menghasilkan lebih dari 12.000 lulusan dengan berbagai jenjang akademik/profesi (Editorial, 2019). Yang menarik, 84 (66%) dari lembaga pendidikan tinggi psikologi itu berlokasi di Pulau Jawa.

Salah satu pembacaan tentang situasi Psikologi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa kendati mengalami perkembangan pesat secara kuantitatif seperti tercermin dari jumlah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi psikologi yang terhimpun dalam AP2TPI, namun ditengarai kurang menunjukkan performa yang setara secara kualitatif seperti tercermin dari kritik berikut ini. Konon, Psikologi di Indonesia selalu dibayang-bayangi oleh persoalan relevansinya bagi pemecahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan-kebangsaan pada umumnya (Gismar, 2019). Salah satu pemicunya bersumber pada epistemologi. Metode Psikologi di Indonesia berfokus pada kesadaran individu sehingga diduga kurang mampu berbicara tentang apalagi memecahkan masalah-masalah sosial. Kecenderungan ini diduga terkait dengan hubungan Psikologi Indonesia dengan Psikologi Barat yang oleh Gismar (2019) disebut masih bersifat hubungan pusat-pinggiran, di mana Psikologi di Indonesia lebih merupakan pengguna konsep, teori dan metode yang berkembang di Barat nyaris tanpa jarak.

Di negara-negara Barat sendiri kritik serupa tidak hanya diarahkan pada Psikologi melainkan bahkan terhadap apa yang disebut *the psy-complex*, yaitu keseluruhan sektor industri yang menyediakan layanan bantuan mengatasi jenis-jenis gangguan emosi dan tingkah laku yang merusak rasa sejahtera seseorang, melibatkan para konselor, pekerja sosial dan psikolog (Sloan, 2008). Kebanyakan aliran psikologi yang berkembang khususnya di Amerika Utara dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an yang menjelma menjadi arus utama dan dijadikan pegangan para praktisi dalam menjalankan praktiknya di lingkungan *psy-complex* hingga kini, menganut paham individualisme dan hedonisme (Watkins & Shulman, 2008). Teori-teori itu berasumsi bahwa yang harus menjadi fokus perhatian Psikologi adalah individu yang bersifat otonom sedangkan tujuan utamanya adalah membantu sang individu meraih kebahagiaan dan kepuasan

pribadi. Teori-teori itu juga bercorak ahistoris dan universalis, berpandangan bahwa hakikat kepribadian dan psikopatologi adalah sama di setiap zaman maupun kebudayaan. Teori-teori itu bervisi homeostasis, dalam arti lebih meyakini persistensi ketimbang transformasi struktur-struktur sosial yang bersifat esensial. Ditambah dengan orientasi ilmiah-positivis yang dianut, teori-teori arus utama itu berambisi menemukan norma-norma kehidupan emosi dan tingkah laku yang berlaku universal serta cara-cara yang juga berlaku secara universal dalam membantu individu menyimpang untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma itu. Alhasil, teori-teori itu terjebak pada sejenis saintisme kering, mengutamakan variabel-variabel yang bisa dikuantifikasikan dan diukur ketimbang berusaha menganalisis *lived experience* atau pengalaman yang secara nyata dihidupi oleh pribadi dan kelompok atau komunitas yang hidup di dalam lingkungan budaya, sosial dan ekonomi tertentu pada era tertentu. Sebagaimana kita tahu, pandangan dan pendekatan yang dominan dalam Psikologi ini diekspor praktis ke seluruh dunia, termasuk Indonesia (Watkins & Shulman, 2008; bandingkan Gismar, 2019).

Nilai Budaya Indigenos dan Pembangunan Berkelanjutan di Era Industri 4.0

Untuk memahami makna nilai budaya indigenos, kiranya agak sukar kalau bukan mustahil tanpa terlebih dulu mencoba mengenal apa atau siapa itu orang-orang, masyarakat, atau bangsa indigenos. Ada yang menyatakan, bangsa indigenos adalah bangsa atau orang-orang yang lahir di suatu teritori atau wilayah tertentu (Ashcroft *et al.*, 2007). Pengertian yang lebih rinci dan secara resmi dipakai oleh lembaga internasional seperti *Perserikatan Bangsa-bangsa* (PBB) menyatakan bahwa komunitas, orang-orang dan bangsa indigenos adalah mereka yang karena memiliki pertalian sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang bermukim di wilayah mereka, memandang diri mereka berbeda dengan sektor-sektor lain di dalam masyarakat yang kini 'berkuasa' (*prevailing*) di wilayah atau sebagian wilayah mereka itu ('State of the world', 2009). Tidak semua bangsa atau orang-orang di sebuah wilayah baik yang menyebut diri atau disebut indigenos oleh pihak lain memiliki sejarah kolonialisme, namun ciri utamanya sama yaitu bahwa mereka memandang diri berbeda dari sektor masyarakat lain atau apa pun itu yang kini hadir berkuasa atau dominan di wilayah atau dalam kehidupan mereka. Konon jumlah mereka saat ini ada lebih dari 370 juta jiwa, tersebar di 90 negara di seantero dunia ('State of the worlds', 2009).

Secara umum, situasi yang dialami orang-orang atau bangsa indigenos di seluruh dunia adalah sebagai berikut ('State of the world', 2009): (1) mengalami diskriminasi dan eksklusi atau pengucilan sistemik dari kekuasaan politik dan ekonomi di tengah masyarakat di mana mereka hidup; (2) menempati proporsi terbesar di dalam kategori kelompok paling miskin, buta aksara, dan papa atau sengsara; (3) mengalami ketergusuran akibat perang dan/atau bencana alam; (4) kaum perempuannya rentan menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual dalam aksi pembasmian etnik maupun demoralisasi yang dilakukan oleh pihak lain terhadap komunitas-komunitas indigenos; (5) tanah leluhurnya dirampas dan diasingkan dari sumber-sumber penopang kelangsungan hidup mereka, baik fisik maupun budaya, atau bahkan; (6) dirampas hak hidup mereka; (7) dalam versi eksploitasi pasar yang lebih modern, pengetahuan dan berbagai ekspresi budaya mereka dipasarkan dan dipatenkan oleh pihak lain tanpa persetujuan dan partisipasi mereka; (8) dari lebih dari 7000 bahasa yang ada di dunia, diperkirakan lebih dari 4000 adalah bahasa komunitas indigenos, dan dikhawatirkan 90% dari bahasa yang ada di dunia itu akan musnah atau setidaknya terancam musnah di akhir abad ini. Bisa diduga, bahasa masyarakat indigenos akan menempati proporsi terbesar dalam fenomena *language extinction* atau punahnya bahasa itu.

Dengan latar belakang sejarah dan kualifikasi yang berlainan, contoh orang-orang atau bangsa indigenos di Indonesia meliputi misalnya, Suku Anak Dalam di Jambi, Sumatera, suku bangsa Baduy di Banten, Jawa Barat, orang-orang Samin di Blora, Jawa Tengah, atau sejumlah suku

bangsa di Kalimantan dan Papua, bahkan suku bangsa Jawa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Empat contoh pertama kurang lebih memenuhi seluruh atau sebagian besar kualifikasi yang diidentifikasikan oleh PBB. Mereka ini lazimnya mengatur hidup dengan kearifan lokal, yaitu nilai fundamental bersumber tradisi budaya yang memberikan orientasi bagi eksistensi mereka sebagai komunitas. Mereka mengandalkan kearifan lokal sebagai perangkat kebijakan dan nilai budaya untuk menjalani dan menjaga atau mempertahankan kehidupan mereka yang sederhana (Sukarno, 2019). Sebaliknya, suku bangsa Jawa dan sebenarnya juga berbagai suku bangsa atau kelompok sosial dominan lain di Indonesia kurang lebih memenuhi status indigenos khususnya jika ditempatkan dalam diskursus pengembangan ilmu sosial-kemanusiaan (modern) teristimewa Psikologi. Seperti sudah disinggung sebelumnya, Psikologi di Indonesia dinilai sangat tergantung pada konsep, teori dan metode dari bangsa-bangsa Euro-Amerika yang saat ini merupakan pihak yang dominan dalam produksi pengetahuan Psikologi (bandingkan Gismar, 2019; Yuniarti, 2013; Pradipta & Agung, 2021; Prawitasari, 2005). Untuk melihat sejenis dilema yang berpotensi muncul dalam perjumpaan antara nilai indigenos di satu sisi dan *sustainable development* dalam era Industri 4.0. di sisi lain, pembahasan selanjutnya akan bertolak dari situasi empat contoh pertama orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai orang-orang indigenos seperti digariskan oleh PBB.

Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan adalah sejenis program pembangunan berjangka panjang yang disepakati dan dicanangkan oleh negara-negara anggota PBB pada 25 September 2015 untuk dilaksanakan di masing-masing negara anggota. Nama resmi program ini adalah *Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030,* terdiri atas tujuh belas *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (TPB) mulai dari pengentasan kemiskinan sampai penguatan kemitraan antar negara anggota untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Tujuan-tujuan ini konon merupakan kelanjutan dari *Tujuan Pembangunan Milenium* yang disepakati oleh 147 kepala negara dan pemerintahan pada September 2000 untuk diupayakan tercapai pada 2015, namun kiranya dipandang perlu dilanjutkan (Carino, 2009). Di Indonesia, agenda pembangunan berkelanjutan itu dipertajam dalam sebuah peta jalan dengan inti kurang lebih sebagai berikut (‘Roadmap’, tanpa tahun). Pertama, disajikan gambaran besar tentang situasi penduduk Indonesia sebagai semacam dasar pertimbangan. Dinyatakan, misalnya, penduduk Indonesia terdiri dari 1340 suku bangsa dengan perbedaan dalam hal budaya, bahasa dan keyakinan; demografi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,7% dari keseluruhan jumlah penduduk (data tahun 2019); dan 53,3% penduduk tinggal di kota-kota (urbanisasi) akibat pergeseran penghidupan dari sektor pertanian ke sektor manufaktur. Kedua, visi dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah *increasing people’s well-being* atau meningkatkan kesejahteraan warga negara. Untuk itu, ketiga, dipilih tujuh isu kunci sebagai semacam prioritas, meliputi: (1) kesehatan, (2) pendidikan, (3) perlindungan sosial, (4) keamanan pangan dan pertanian berkelanjutan, (5) infrastruktur, (6) layanan ekosistem dan keragaman hayati, dan (7) pembiayaan layanan administrasi pemerintah (‘Roadmap’, tanpa tahun).

Kendati gagasan maupun rumusan tentang agenda dan tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri baik dan mulia, namun kiranya tetap berpotensi memunculkan dilema khususnya jika dikaitkan dengan situasi orang-orang dan nilai-nilai indigenos justru karena konsep *development* yang bermakna pembangunan itu sendiri. Hasil pelacakan Gustavo Esteva (1992, seperti dikutip dalam Watkins & Shulman, 2008), seorang intelektual Meksiko, menunjukkan bahwa istilah *development* mengalami perubahan makna sampai minimal tiga kali. Mula-mula *development* dimaknai perkembangan, yaitu momen saat sebuah tanaman atau binatang mencapai bentuk penuh sesuai kodrat alamiahnya. Perubahan pertama terjadi antara tahun 1759 dan 1859, ketika

makna itu diperluas menjadi perubahan sosial dan ekonomi sebuah masyarakat atau bangsa dengan tetap berkonotasi perkembangan, evolusi, dan maturasi atau pematangan. Perubahan kedua ditandai dengan penyamaan makna 'perkembangan' dan 'evolusi'. Artinya, makna 'perkembangan' diperluas dari semula bermakna tercapainya bentuk yang semestinya (*appropriate*) menjadi tercapainya bentuk yang dipandang sempurna atau ideal. Menurut Gustavo Esteva, sejak itulah masyarakat dan budaya di dunia mulai dinilai dan di-*ranking* dengan ukuran sejauh mana sebuah masyarakat-budaya telah mencapai standar Euro-Amerika, seolah-olah standar Euro-Amerika itu merupakan hukum alam yang diturunkan dari surga. Sebagaimana sejarah menunjukkan, sepanjang abad ke-19 dan ke-20 diskursus atau wacana *development* telah berperan secara efektif sebagai dasar pembenaran bagi kolonialisme oleh bangsa-bangsa Eropa-Amerika terhadap bangsa-bangsa di belahan bumi lainnya.

Menurut Gustavo Esteva, perubahan makna *development* yang ketiga terjadi selama berlangsungnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia II. Dalam rangka menarik simpati negara-negara non-blok yang umumnya merupakan negara-negara miskin dan yang sebagian baru lepas dari penjajahan agar bergabung ke dalam lingkaran pengaruh masing-masing, khususnya Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Truman menawarkan apa yang disebut '*program of development'* yang kini bermakna 'pembangunan'. Program bantuan ini bertujuan 'membuat manfaat dari berbagai perkembangan ilmiah dan kemajuan industri KITA (penekanan oleh penulis) dinikmati bagi kemajuan negara-negara yang terbelakang (*underdeveloped*)'. Sejak itulah terjadi pembelahan antara segelintir bangsa-budaya yang layak dikagumi-ditiru di satu sisi dan sejumlah besar bangsa-budaya yang inferior-terbelakang di sisi lain. *Development* dalam arti 'pembangunan' dipromosikan sebagai proses-tindakan luhur-mulia bantuan dari bangsa-bangsa 'maju' (*developed*) kepada bangsa-bangsa 'terbelakang' (*underdeveloped*), berupa antara lain pemberian hutang atau pinjaman untuk modal pembiayaan dan penyediaan IPTEK beserta tenaga ahli untuk implementasi program pembangunan yang dimaksud. Ukuran keberhasilannya tentu saja adalah ekonomi, berupa *gross national product* (GNP), tanpa menghiraukan pihak mana sebenarnya yang paling diuntungkan dari transaksi semacam itu sekaligus mengabaikan berbagai ukuran lain kesejahteraan manusia (Watkins & Shulman, 2008).

Salah satu kritik serius terhadap model 'program pembangunan' ini adalah tudingan bahwa sesungguhnya melalui program bantuan itu negara-negara maju di Eropa dan Amerika sedang mengekspor agenda ekonomi dan politik mereka yang justru kontraproduktif bagi negara-negara "terbelakang" yang dibantu (Watkins & Shulman, 2008). 'Pembangunan' lebih sering dimaknai mengadopsi sistem ekonomi dan budaya (kapitalis) yang justru berdampak mempercepat laju keterbelakangan negara-negara terbelakang atau sedang berkembang melalui masuknya modal asing dan yang harus dibayar dengan terkurasnya sumber daya alam, tergusurnya masyarakat adat, hancurnya budaya lokal, dimanfaatkannya komunitas lokal sebagai tenaga kerja murah demi menghasilkan berbagai produk untuk dijual dengan harga mahal ke negara-negara kaya, sekaligus masuknya produk-produk manufaktur dari negara-negara maju yang harus dibeli dengan harga mahal oleh masyarakat lokal. Artinya, melalui 'model pembangunan' negara maju justru mendapatkan peluang melipatgandakan modalnya dengan cara menguras modal negara sedang berkembang yang dijadikan mitra kerja yang dibantu. Dilema antara kemajuan dan keterbelakangan yang sarat ketidakadilan bagi masyarakat di negara-negara sedang berkembang khususnya masyarakat indigenos itu kiranya justru bisa semakin diperparah dengan kehadiran Revolusi Industri 4.0 (Sukarno, 2019). Bisa dikatakan, masyarakat di negara-negara sedang berkembang sangat mungkin malah dibuat semakin merasa '*underdeveloped'* serta semakin tunduk serba tergantung mengikuti genderang negara-negara maju dengan hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang merupakan produk budaya IPTEK mereka.

Bagaimana respon komunitas Psikologi bukan hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara lain termasuk negara-negara Barat sendiri menghadapi dominasi pembangunanisme yang ditunjang oleh Revolusi Industri 4.0 yang diduga justru akan semakin membelah bangsa-bangsa di dunia ke dalam kategori maju versus terbelakang, pusat versus pinggiran? Salah satu jenis tanggapan yang juga ingin saya promosikan pada kesempatan ini adalah apa yang diungkapkan oleh Gustavo Esteva (1992, seperti dikutip oleh Watkins & Shulman, 2008) berikut ini. Dia mengatakan,

> "We were a different kind of people and suddenly we all became underdeveloped. If you become underdeveloped, it's a very humiliating condition. Very undignified condition. You cannot trust your nose. You need to trust the experts that will bring you to development. You cannot dream your dreams because they are already dreamt. That is the model to go" (h. 33).

Gustavo Esteva sebagai representasi orang atau bangsa sedang berkembang yang harus menerima bantuan program pembangunan dari negara atau pihak yang merasa lebih maju menolak disebut '*underdeveloped'* atau terbelakang. Dia memilih menyebut diri '*different*' atau 'berbeda' agar tetap bisa bermimpi sendiri tentang kemajuan dan kesejahteraan yang ingin diraihnya, bukan yang 'diimpikan' oleh para ahli dari bangsa-bangsa yang merasa lebih maju dan menawarkan bantuan. Maka, yang dia perjuangkan adalah *liberation* atau pembebasan atau pemerdekaan, bukan *development* atau pembangunan seperti dipikirkan oleh bangsa-bangsa maju. Itulah juga yang diperjuangkan oleh aliran-aliran Psikologi baru yang mengusung tema pembebasan atau pemerdekaan baik dengan menggunakan label *Psikologi Perdamaian* atau *Psikologi Kritis*. Aliran-aliran Psikologi baru ini menolak agenda eksploitasi yang tersembunyi di dalam sejarah munculnya gagasan tentang pembangunan. Sebaliknya, mereka memilih istilah pembebasan atau pemerdekaan untuk menegaskan landasan bagi tiap bangsa untuk merumuskan dan mengupayakan sendiri aspirasi mereka, termasuk dalam memroduksi dan mengembangkan pengetahuan maupun metode dalam Psikologi.

Mengikuti *Cultural Turn* demi Mendapatkan Psikologi yang Lebih Relevan dan Membebaskan

Cultural turn atau *hampiran* atau *balikan* budaya adalah gerakan intelektual di kalangan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan di awal dasawarsa 1970-an dan 1980-an di Eropa Barat, khususnya Prancis (Best & Marcus, 2009). Gerakan yang secara umum disebut *posmodernisme* ini merupakan respon terhadap *modernisme.* Modernisme sendiri adalah gerakan intelektual berorientasi positivistik-logis yang dilandasi semangat mencari kebenaran sebagai dasar segala pengetahuan tentang "realitas luar" yang bersifat pasti melalui semacam perumusan narasi besar sebagai sejenis hukum yang berlaku secara universal untuk keperluan melakukan prediksi dan kontrol atas segala bentuk realitas objektif termasuk tingkah laku manusia (Sugiharto, 1996; Gergen, 1990). Seperti sudah disinggung, teori-teori psikologi arus utama khususnya dari Amerika Utara yang ditiru di Indonesia hingga kini seperti antara lain ditengarai oleh Gismar (2019) merupakan bagian dari modernisme. Sebaliknya, psikologi yang mengapropriasi hampiran atau balikan budaya cenderung menekankan sifat personal pengetahuan serta keterikatan atau kesatuan tingkah laku manusia dengan konteks ruang dan waktu yang melingkunginya (Capaldi & Proctor, 2003). Untuk lebih memahaminya, baiklah diuraikan sekilas pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam *cultural turn* sebagai gerakan intelektual baru dalam produksi pengetahuan tentang manusia di kalangan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, semestinya termasuk Psikologi.

Hampiran budaya dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan memiliki tiga pengandaian dasar tentang manusia dan tingkah lakunya sebagai objek material yang diteliti. Psikologi yang berorientasi

hampiran budaya harus mengikuti tiga pengandaian dasar ini. Pertama, Psikologi berorientasi hampiran budaya perlu memperlakukan manusia sebagai makhluk berkebudayaan, yaitu makhluk yang berhasrat (living being atau makhluk biologis), melakukan pertukaran dalam sebuah jaringan relasi sosial (exchanging being atau makhluk yang melakukan pertukaran, khususnya terkait kekuasaan atau politik dan sumber daya material kehidupan atau ekonomi), dan berbahasa (speaking being atau makhluk yang berbahasa atau menggunakan simbol-simbol) sekaligus. Pendekatan ini sering juga disebut lintas disiplin dalam arti mencakup sejumlah disiplin ilmu sekaligus (Sunardi, St., komunikasi pribadi).

Sebagai living being atau makhluk biologis, manusia digerakkan oleh berbagai hasrat yang disebut instink (Freud, 1960), desires atau hasrat (Lacan, 2008), atau kebutuhan (Maslow, seperti dikutip dalam Goble, 1987), dan sebagainya. Sebagai makhluk yang melakukan exchanges atau pertukaran, manusia melakukan transaksi dengan manusia lain seputar kekuasaan (politik) dan sumber material kehidupan atau bentuk representasinya khususnya berupa uang (ekonomi). Sebagai speaking being atau makhluk yang berbicara manusia mengembangkan, menggunakan, serta mengalami diri dan realitasnya melalui bahasa sebagai sistem tanda dalam arti luas tidak hanya terbatas bahasa verbal (ungkapan, gosip, umpatan, pidato, prosa, puisi, khotbah) melainkan juga bahasa tubuh (fesyen atau busana, gaya dan warna rambut, tato, pernak-pernik perhiasan) bahasa visual (gambar, foto, film, grafiti, iklan) bahasa spasial (pembagian ruang di kantor, di rumah, arsitektur, pembuatan pagar atau sekat sebagai pembatas privasi) bahasa gerak (gaya berjalan, tari) bahasa bunyi (musik, warna suara, intensitas bunyi), dan sebagainya.

Kedua, Psikologi berorientasi hampiran budaya berkeyakinan bahwa pada dasarnya praktis tidak ada tingkah laku manusia yang bersifat alamiah, hampir semua tingkah laku manusia beserta aneka produknya bersifat kultural dalam arti memiliki sejarah pembentukan sosial melalui mekanisme yang oleh Richard Johnson (1987) disebut sirkuit budaya (Gambar 1).

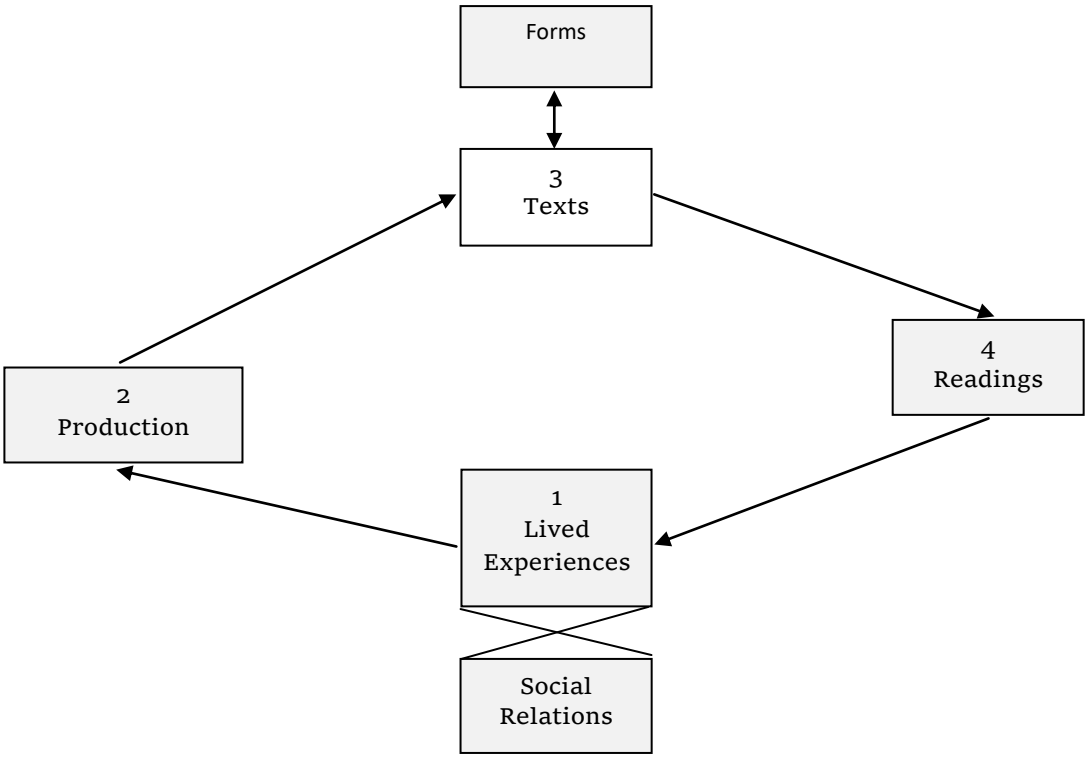

Gambar 1 Sirkuit Budaya
Sumber: Richard Johnson (1987) dengan modifikasi.

Penafsiran bebas terhadap penalaran kerangka berpikir di atas adalah sebagai berikut. Manusia mengalami kehidupan nyata sehari-hari (lived experiences) berupa aneka relasi sosial (social relations) yang sarat dengan aneka bentuk mekanisme pertukaran dalam rangka memenuhi aneka kebutuhan hidup dengan media aneka bentuk tanda sebagai bahasa. Aneka bentuk tingkah laku atau produk tingkah laku yang dalam arti luas disebut teks (texts) dan bisa berbentuk aneka rupa benda-gagasan-tingkah laku-lembaga-peristiwa (forms) ini merupakan hasil ciptaan (productions atau produksi) orang atau kelompok orang dalam rangka memenuhi atau memaksimalkan pemenuhan kebutuhan hidupnya itu. Agar kebutuhan ini terpenuhi, tentu saja teks dalam arti luas yang diproduksi itu harus didiseminasikan atau disebar-luaskan dan diharapkan dibaca (readings) dalam arti diterima oleh orang lain seperti dimaksudkan oleh orang atau kelompok yang memroduksinya, sehingga menghasilkan pengalaman bersama (lived experiences) dan bentuk relasi sosial (social relations) baru yang tentu saja paling menguntungkan bagi orang atau kelompok yang memroduksi dan mendiseminasikan teks itu.

Tentu saja realitas sosial tidak pernah homogen-monolitik. Kendati ada praktik dominan yang menjadi arus utama dan yang selalu diusahakan untuk direproduksi atau diulang-ulang oleh kelompok dominan dalam masyarakat, selalu ada kelompok-kelompok lain yang berusaha menunjukkan negosiasi dengan cara memroduksi teks-teksnya sendiri dan/atau melakukan pembacaan terhadap teks-teks yang diproduksi oleh kelompok lain dengan caranya sendiri. Akibatnya, realitas sosial masyarakat selalu merupakan himpunan aneka praktik yang tidak pernah bersifat homogen dan sangat boleh jadi saling berkontestasi atau saling bersaing untuk memperoleh status dominan atau setidaknya melepaskan diri dari dominasi praktik yang dominan.

Maka, Psikologi berorientasi hampiran budaya tidak semestinya berpretensi mencari kebenaran dalam arti the truth atau satu-satunya kebenaran, melainkan berupaya mengungkap aneka kebenaran agar bisa menemukan salah satu atau sebagian yang akan mampu memberikan penjelasan yang menghasilkan kebaikan bagi paling banyak orang dalam persaingan antar berbagai versi "kebenaran". Bukan berarti Psikologi berorientasi hampiran budaya (harus) menganut paham relativisme radikal sebagaimana ditudingkan oleh fisikawan Alan Sokal (Lewis, 2005). Sebaliknya, mereka menghormati aneka versi kebenaran namun tetap mempromosikan salah satu versi yang akan paling menjamin terciptanya kebaikan bagi paling banyak orang tanpa mengenal berbagai jenis perbedaan.

Ketiga, dalam memahami dan menjelaskan tingkah laku manusia Psikologi yang berorientasi hampiran budaya tidak bisa tidak harus mempertimbangkan bahkan secara aktif menggunakan empat konsep utama yang dipandang mewarnai tiap gerak budaya dan tingkah laku manusia (Hall, tanpa tahun) berikut ini: (1) hegemoni, (2) tanda dan semiotika, (3) representasi dan wacana, serta (4) makna dan struggle. Melalui konsep hegemoni Psikologi berorientasi hampiran budaya meyakini bahwa dalam tiap masyarakat khususnya masyarakat industri seperti kita jalani sekarang, terdapat banyak kemungkinan budaya dalam arti cara memaknai dan menghayati kehidupan yang berlainan sesuai konteks ruang dan waktu. Artinya, dalam tiap masyarakat industri, budaya tidak pernah merupakan sebuah struktur yang homogen, melainkan bersifat multifaset mencerminkan cara yang berlainan dalam menghadapi-mengatasi berbagai konstelasi pengalaman hidup yang bersifat sosial dan material dalam rangka mempertahankan kehidupan, dan yang akan saling bernegosiasi atau bahkan bersaing. Dalam persaingan itu, senantiasa ada salah satu cara memaknai dan menghayati kehidupan oleh salah satu pihak yang tampil dominan

dan berusaha memengaruhi pihak lain untuk mengikutinya. Muncullah fenomena hegemoni, lazimnya diterima sebagai sesuatu yang lumrah-wajar (Hall, tanpa tahun).

Melalui konsep tanda dan semiotika Psikologi berorientasi hampiran budaya meyakini bahwa aneka objek dan peristiwa sebagai produk atau ungkapan tingkah laku manusia merupakan tanda yang harus dikaji dengan semiotika atau ilmu tanda sebagai metode utama. Berbagai objek (fesyen atau busana, arsitektur), gejala (korupsi, mudik), lembaga (ormas, partai politik, pesantren waria) peristiwa (konser dang-dut, demo mahasiswa) sebagai produk atau bentuk ungkapan tingkah laku manusia dipandang bisa dibaca dengan cara yang sama seperti membaca tanda dan bahasa (Hall, tanpa tahun).
Melalui konsep representasi dan wacana Psikologi berorientasi hampiran budaya meyakini bahwa membaca merupakan tindakan melakukan rekonstruksi makna, bukan sekadar merefleksikan atau memantulkan makna yang diandaikan sudah terkandung secara tetap dalam tiap bentuk tingkah laku sebagai teks. Representasi lazim diterapkan dalam tindakan membaca dalam arti memaknai objek atau fenomen tunggal, sedangkan wacana diterapkan dalam tindakan membaca dalam arti memaknai objek atau fenomen budaya dan tingkah laku yang lebih luas atau kompleks. Wacana adalah cara memaknai dalam arti cara mengomongkan dan cara bertindak terhadap sebuah gagasan (misal, kesehatan mental) atau kelompok warga masyarakat tertentu (misal, kaum LGBT; Hall, tanpa tahun).
Melalui konsep makna dan struggle Psikologi berorientasi hampiran budaya meyakini bahwa tiap objek atau peristiwa baru bermakna saat makna itu diproduksi oleh orang atau kelompok orang tertentu melalui representasi sebagai signifikasi atau kegiatan menamai atau memberikan makna. Definisi tentang sebuah kata menjadi dominan manakala kelompok orang yang berkuasa mengakui asosiasi antara kata tertentu sebagai tanda dengan makna tertentu dan asosiasi itu terus direproduksi dalam arti diulang-ulang. Karena terus diulang-ulang, makna ini menjadi tersedimentasi dalam arti menjadi tetap atau baku dan diterima sebagai sesuatu yang wajar-normal-alamiah. Persaingan bahkan pertarungan makna sebuah tanda akan terjadi manakala sebuah makna menjadi problematis misal dipicu oleh peristiwa yang di luar dugaan atau ada kelompok dalam masyarakat yang memroduksi makna alternatif atau tandingan (Hall, tanpa tahun). Artinya, Psikologi berorientasi hampiran budaya harus peka terhadap dimensi kekuasaan dalam memahami dan menjelaskan aneka bentuk tingkah laku manusia dalam konteks waktu dan ruang tertentu. Contoh, sesuatu dinilai baik dan benar: menurut siapa, bagi siapa, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Dengan kualifikasi seperti telah diuraikan, Psikologi yang berorientasi hampiran budaya kiranya akan mampu secara tepat menyikapi serta secara efektif memilih tindakan dalam menghadapi dilema seperti yang sangat mungkin muncul dalam perjumpaan antara nilai-nilai indigenos berhadapan dengan potensi risiko atau bias pembangunan berkelanjutan di era Industri 4.0.

3. KESIMPULAN

Berbeda dengan Psikologi Euro-Amerika arus utama yang mengutamakan fokus pada individu, Psikologi berorientasi hampiran budaya sangat menaruh perhatian pada individu di dalam keterkaitannya dengan konteks komunitas, budaya, sejarah, dan lingkungan seumumnya. Menyadari bahwa keterkaitan individu khususnya dengan konteks sosialnya itu senantiasa diwarnai oleh relasi kuasa yang berpotensi menciptakan sejenis peminggiran-penindasan akibat hegemoni bahkan dominasi maka Psikologi berorientasi hampiran budaya lebih mengutamakan konsep pembebasan atau pemerdekaan ketimbang perkembangan atau pembangunan sebagai tujuan transformasi individu maupun masyarakat. Seperti dinyatakan oleh Watkins dan Shulman

(2008), pembebasan atau pemerdekaan senantiasa bermakna saling ketergantungan atau kebersamaan. Artinya, pemerdekaan salah satu pihak tidak bisa dilepaskan dari pemerdekaan semua pihak lain, sebab tiap pihak yang terlibat akan mengalami perubahan dalam proses. Selain itu, pembebasan atau pemerdekaan sekaligus bermakna mencakup realitas pribadi, sosial, ekonomi, politik bahkan spiritual sekaligus. Entah dikenal dengan sebutan Psikologi Indigenos (Yuniarti, 2013; Pradipta & Agung, 2021) atau Psikologi Nusantara (Prawitasari, 2005), Psikologi berhampiran budaya pada dasarnya terbuka terhadap semua konsep dan gagasan dari mana pun tak peduli dari bangsa maju maupun yang masih terbelakang atau indigenos, dari Barat maupun Timur, dari Utara maupun Selatan, sepanjang semua itu sejalan atau bahkan berdampak memperkuat orientasinya ke arah pemerdekaan semua orang atau kelompok orang demi terciptanya kesejahteraan bersama yang sungguh-sungguh berkeadilan. Dalam arti itu pula Psikologi berhampiran budaya akan menjadi benar-benar relevan sebagaimana dicita-citakan oleh Gismar (2019) seperti dikutip di awal tulisan ini. Semoga. Ω

REFERENSI

Anggota. (2021). Diunduh dari https://ap2tpi.or.id/anggota/#toggle-id-20

Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2007). *Post-colonial studies. The key concepts* (2nd ed.). Routledge.

Best, S., & Marcus, S. (2009). Surface reading. An introduction. *Representations, 108* (1), 1-21. DOI: 10.1525/rep.2009.108.1.1

Capaldi, E.J., & Proctor, R.W. (2003). Current and future trends in experimental psychology. Dalam S.E. Davis (Ed.), *Handbook of research methods in experimental psychology* (h. 24-38). Blackwell.

Carino, J. (2009). Chapter I. Poverty and well-being. Dalam *State of the world's indigenous peoples* (h. 14-49). United Nations.

Editorial. (2019). *Psikologi Indonesia, 1*(1), 1-6.

Freud, S. (1960). *The ego and the id* (J. Riviere, Trans.). W.W. Norton & Company.

Gergen, K.J. (1990). Toward a postmodern psychology. *The Humanistic Psychologist, 18*, 23-34. https://doi.org/10.1080/08873267.1990.9976874

Gismar, Abdul Malik. (2019). Menjadi psikologi yang relevan. *Psikologi Indonesia, 1*(1), 8-14.

Goble, F.G. (1987). *Mazhab ketiga. Psikologi humanistik Abraham Maslow* (A. Supratiknya, Trans.). Penerbit Kanisius.

Hall, S. (tanpa tahun). Stuart Hall and cultural studies: Decoding cultural oppression. Diunduh dari https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/13286_Chapter_2_Web_Byte__Stuart_Hall.pdf

Johnson, R. (1986-1987). What is cultural studies anyway, *Social Texts*, *16* (Winter), 38-80. http://www.jstor.org/stable/466285

Lacan, J. (2008). *My teaching* (D. Macey, Trans.). Verso.

Lewis, W.S. (2005). Knowledge versus "knowledge": Louis Althusser on the autonomy of science and philosophy from ideology. *Rethinking Marxism*: *A Journal of Economics, Culture, & Society, 17*(3), 455-470. DOI: 10.1080/08935690500122354

Pradipta, Yosef Dedy, & Agung, Yusuf Ratu. (2021). *Psikologi indigenos: Telaah relasi manusia pada konteks budaya.* Edulitera.

Prawitasari, Johana E. (2005). Psikologi Nusantara: Ke sanakah kita menuju? *Pidato Lustrum VIII Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.*

Roadmap of SDGs Indonesia: A Highlight. (tanpa tahun). Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency.

Santoso, Slamet Iman R. (1975). *Psychologi sebagai ilmu pengetahuan dan hari depan.* Bulan Bintang.

Sejarah. (2021a). Diunduh dari https://psikologi.ui.ac.id/sejarah/

Sejarah Fakultas Psikologi Unpad. (2021b). Diunduh dari https://psikologi.unpad.ac.id/sejarah-psikologi-unpad/

Sejarah. (2021c). Diunduh dari https://psikologi.ugm.ac.id/sejarah/

Sloan, T. (2008). Preface. Dalam M. Witkins & H. Shulman (Eds.), *Toward psychologies of liberation* (h. xi-xii). Palgrave Macmillan.

State of the world's indigenous peoples. (2009). United Nations.

Sugiharto, Bambang I. (1996). *Postmodernisme. Tantangan bagi filsafat*. Penerbit Kanisius.

Sukarno. (2019). Saving and preparing the indigenous communities to face the Industrial Revolution 4.0 era through local wisdom and English language mastery. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 335,* 410-418.

Watkins, M., & Shulman, H. (2008). *Toward psychologies of liberation.* Palgrave Macmillan.

Yuniarti, Kwartarini Wahyu. (2013). Psikologi *indigenous.* Saatnya menentukan *mainstream* keilmuan dari Tanah Air. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.*

Disajikan dalam *Seri Seminar Nasional ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 (Serina III Untar 2021),* oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara, Kamis, 2 Desember 2021.

(*halaman kosong*)